

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menarik, peringatan yang disampaikan oleh Barry Commoner (1973) dalam bukunya, *“The Closing Circle”*. Pada saat itu, berdasarkan pengamatan yang dilakukan jauh sebelumnya, ia mencermati bahwa teknologi merupakan sumber terjadinya masalah lingkungan. Terjadinya revolusi di bidang ilmu pengetahuan alam, yang terjadi selama lima puluh tahun terakhir, telah mendorong perubahan-perubahan besar di bidang teknologi dan membawa dampak sangat besar pada perubahan lingkungan. Konkretnya adalah terdegradasinya kualitas lingkungan hidup itu sendiri.¹

Masalah lingkungan dengan manifestasinya yang paling menonjol mengenai masalah pencemaran seperti pencemaran udara dan air di negara-negara industri, pencemaran lingkungan karena kemiskinan dan negara-negara yang sedang berkembang mulai dipersoalkan. Bagi negara-negara berkembang, hal tersebut ditambah lagi dengan tekanan penduduk, keterbatasan sumber daya alam yang tersedia dan akibat sampingan dari penggunaan sumber daya alamnya. Pencemaran oleh industri yang bersifat toksis, akibat atau kerusakan yang tidak dapat dipulihkan (*irreversible*) serta kerusakan ekologis yang luas dapat mengancam ekosistem bumi sebagai sistem pendukung kehidupan planet bumi.²

Pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia telah terjadi di manamana. Dari tahun ke tahun akumulasinya selalu bertambah dan cenderung tidak dapat terkendali, seperti kerusakan dan kebakaran hutan, banjir pada waktu musim penghujan, dan kekeringan pada waktu musim kemarau. Berbagai bencana alam terjadi di berbagai daerah, seperti banjir bandang dan tanah longsor, terjadi di Pacet (2002), Bohorok (2003), Jember (2005), Bajarnegara (2006) dan Gempa Bumi di Yogyakarta (2006). Demikian juga kerusakan terumbu karang, pencemaran air (sungai), tanah

¹ H. Joni, 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 31

² M. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 8

dan udara di berbagai daerah sudah mencapai pada tarap yang amat mengkhawatirkan. Pencemaran yang mendapat perhatian begitu luas adalah pencemaran lingkungan laut yang terdapat di Teluk Buyat, Sulawesi Utara (2004). Pencemaran lingkungan laut terjadi akibat pembuangan limbah industri tambang yang terjadi di Teluk Buyat telah menimbulkan penyakit yang ditengarai sebagai penyakit “minamata”, suatu jenis penyakit yang menakutkan yang pernah terjadi di Jepang akibat makanan yang dikonsumsi terkontaminasi logam berat berupa arsen dan merkuri. Sebagai pihak yang dituduh bertanggung jawab adalah perusahaan penambangan emas PT Newmont Minahasa Raya yang diduga telah melakukan pembuangan limbah tambang di Teluk Buyat.³

Selain itu, kasus- kasus lingkungan lainnya seperti kasus PT Freeport Indonesia di Irian Jaya, PT Newmont Minahasa Raya, serta semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, selain penegakan hukumnya tidak jelas, hak asasi masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terabaikan.⁴

Kasus –kasus lingkungan lain yakni kasus tercemarnya Sungai Babon yang mengalir di kawasan industri dan lingkungan pemukiman. Sejumlah industri yang beroperasi di kawasan industri Terboyo dan sepanjang jalan raya Kaligawe terdiri dari industri yang menghasilkan produk percetakan, garmen, tekstil, dan industri batako. Limbah yang berasal dari industri merupakan salah satu sumber pencemaran logam berat seperti Pb. Hasil pengambilan sampel air di badan sungai Babon yang dilakukan Balai Lingkungan Hidup pada September 2015 ditemukan kadar logam berat Timbal yang melebihi baku mutu air sungai kelas II yang mengakibatkan tingginya limbah logam berat timbal yang mencemari badan air. Timbal (Pb) termasuk dalam kelompok logam yang beracun dan berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup. Terjadinya suatu perubahan dalam perairan akan menimbulkan dampak bagi organisme yang hidup di dalamnya. Adanya

³ Absori, “Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No.2, (September, 2005), hlm. 221-222

⁴ Muhammad Akib, 2012, *Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 107

logam berat di perairan sangat berbahaya secara langsung terhadap kehidupan biota perairan, yang selanjutnya mempengaruhi secara tidak langsung terhadap kehidupan manusia.⁵ Kasus pencemaran lain adalah tercemarnya Sungai Kapuas yang mencemari sejumlah warga Dusun Piasak, Kabupaten Sanggau yang tinggal di bantaran Sungai Kapus tepat di bagian hilir pabrik PT Indonesia Chemical Alumina, hal ini terkait limbah PT ICA yang tumpah ke sungai pada waktu malam hari, warga terserang penyakit gatal-gatal akibat tercemarnya Sungai Kapuas.⁶

Problem lingkungan hidup merupakan masalah khas yang senantiasa akan muncul dalam sistem kehidupan modern yang bercorak kapitalistik. Dalam praktek, aspek lingkungan sering kurang mendapat perhatian dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, banyak juga dijumpai pendirian usaha yang dapat berdampak terhadap lingkungan, namun tidak dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana mestinya. Apabila terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat dan menimbulkan sengketa lingkungan dengan masyarakat sekitarnya, hampir dipastikan sikap Pemerintah cenderung memihak pada kepentingan pengusaha. Banyak kasus pencemaran yang diadukan pada Pemerintah tidak mendapat perhatian yang semestinya dan tidak ditindaklanjuti penyelesaiannya.⁷

Dalam menyelesaikan sengketa pencemaran lingkungan yang dilakukan di pengadilan dengan menggunakan instrumen hukum perdata maupun hukum pidana terdapat persoalan yang berkaitan dengan problem pembuktian di pengadilan. Majelis hakim lebih mendasarkan pandangan yang bertumpu pada dogma legalitas formal dengan ketentuan hukum yang hanya berorientasi pada pendekatan positifis formal, sebagaimana yang ditentukan dalam hukum perdata, hukum pidana, dan hukum acara yang

⁵ Putri Budiastuti, Mursid Raharjo, Nikie Astorina, "Analisis Pencemaran Logam Berat Timbal di Badan Sungai Babon Kecamatan Genuk Semarang," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 4, No. 5, (Oktober, 2016)

⁶ Merdeka.com, 14 Januari 2015, 11:33 "Sungai Kapuas Tercemar Limbah, Warga Piasak Gatal-Gatal 2 Bulan," dalam <http://www.m.merdeka.com>, diunduh Rabu 12 April 2018, pukul 09:00

⁷ Absori, 2001, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 9-14

mengaturinya.⁸ Lembaga pengadilan dalam memutus sengketa lingkungan sarat dengan pertimbangan kepentingan politik dan ekonomi. Alasan yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan keputusan bukan semata pertimbangan ketentuan aturan hukum tetapi lebih banyak didasarkan alasan agar keputusan yang dijatuhkan tidak mengganggu iklim investasi.⁹ Sehingga dalam banyak pertimbangan dalam penyelesaian sengketa lingkungan, hakim hanya mendasarkan pada pendekatan dogmatis atau pendekatan lain yang berkaitan dengan prosedural dan bukan pendekatan ekologis, sehingga pihak penggugat sering dikalahkan, apalagi jika berhadapan dengan korporasi.

Sebagai contoh, gugatan yang dilakukan oleh WALHI sebagai Penggugat I, Gerakan Masyarakat Cinta Alam (Gema Alam) sebagai Penggugat II menggugat Menteri Lingkungan Hidup atas objek sengketa Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 92 Tahun 2011 mengenai pemberian Izin Penempatan Tailing di Dasar Laut kepada PT. Newmont Nusa Tenggara dalam Proyek Batu Hijau pada tanggal 5 Mei 2011. Namun Majelis Hakim melalui putusan Nomor: 145/G/2011/PTUN-JKT menyatakan menolak gugatan para penggugat dengan alasan prosedural bahwa Gerakan Masyarakat Cinta Alam (Gema Alam) tidak berstatus badan hukum sehingga tidak berkapasitas sebagai penggugat, dengan mengesampingkan pokok perkara.¹⁰

Contoh lainnya, adalah dalam Kasus PT Mikro Metal Perdana, dimana Penggugat adalah WALHI menggugat Bupati Minahasa Utara dengan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 152 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 183 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara No. 152 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Namun melalui Putusan No.

⁸ Absori, 2009, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup: Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 116

⁹ *Ibid.*, hlm. 134

¹⁰ Putusan Nomor 145/G/2011/PTUN-JKT

45/G/2012/PTUN.Mdo, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima sebab penggugat dinyatakan tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam sengketa administratif di bidang lingkungan hidup, maka penggugat secara hukum dinyatakan tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut.¹¹

Dalam ranah litigasi, gugatan class action juga belum begitu efektif. Dalam praktek gugatan *class action* di Brebes. Dimana gugatan class action ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian oleh pemerintah mengenai jalan rusak di jalur pantura.¹² Dimana berawal dari banjir yang melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah pada akhir Januari dan awal Februari di tahun 2006 yang menimbulkan kerugian material maupun immaterial yang tidak sedikit. Salah satunya kerusakan jalan di jalur pantura yang sangat parah yang memunculkan berbagai dampak negatif lainnya. Masalah yang menjadi penyebab cepat rusaknya jalan di jalur pantura adalah operasinya kendaraan –kendaraan berat antar provinsi dan lokal yang berlebihan muatan, pemerintah sudah mengoptimalkan fungsi jembatan di masing-masing tempat dengan pengetatan peraturan dan denda bagi pelanggar namun belum terbukti efektif. Kasus di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes Pemalang kerusakan terparah di wilayah Kabupaten Brebes yang menyebabkan jalan mengalami kerusakan parah.¹³ Hal ini menyebabkan warga melakukan gugatan *class action* melawan pemerintah namun hasil yang didapatkan gugatan tersebut tidak efektif sebab sebagian masyarakat belum tahu tentang class action dan belum tahu manfaat dari class action itu sendiri. Penelitian lain terhadap gugatan class action adalah, dalam praktek gugatan *class action* di Solo, hasil penelitian yang dilakukan oleh Bambang Yulianto¹⁴ (2004), tentang gugatan sejumlah masyarakat

¹¹ Putusan Nomor 45/G/2012/PTUN.Mdo

¹²E. Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2001, hlm. 10

¹³ Dwi Edi Wibowo, “Pelaksanaan Gugatan Class Action Terhadap Pemerintah dalam Kasus Kerusakan Jalan di Jalur Pantura,” *Makalah Lepas*

¹⁴Bambang Yulianto, “Gugatan Class Action terhadap Pendirian Bangunan di Sepanjang Bantaran Sungai di Kota Surakarta,” Tesis, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hlm. 76

yang merasa terganggu haknya atas lingkungan hidup, yakni dengan semakin banyaknya pemukiman baru yang ada di sepanjang bantaran anak sungai Bengawan Solo dan kalau dibiarkan akan berakibat menimbulkan masalah lingkungan, terutama menimbulkan banjir. Masyarakat menggugat Keputusan Wali Kota atas terbitnya sertifikat hak milik atas tanah, sehubungan banyaknya pemukiman baru sepanjang bantaran Anak Sungai Bengawan Solo. Majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta, yang mengadili perkara tersebut dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan sejumlah warga terhadap Keputusan Wali Kota Surakarta yang telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah untuk sejumlah warga negara di bantaran Anak Sungai Bengawan Solo dengan argumentasi bahwa pihak penggugat tidak memiliki *ius standi* sebab dianggap sebagai pihak yang tidak secara langsung dirugikan¹⁵. Berdasarkan hal tersebut maka perlunya penguatan gugatan perwakilan masyarakat dengan didampingi organisasi lingkungan hidup yang dapat mengarahkan jalannya proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Permasalahan lingkungan hidup bukan lagi menjadi permasalahan individu atau satu-dua negara saja, namun telah menjadi tanggung jawab bersama seluruh umat manusia di dunia. Kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia dapat dikatakan hampir mencapai titik kulminasi tertinggi. Indonesia sebagai salah satu jantung dan paru-paru dunia, kerap kali diharapkan untuk menjadi pelopor dan motor penggerak terciptanya kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup. Untuk itu mutlak diperlukan adanya peningkatan budaya sadar berlingkungan di setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga seluruh tindakan dan kebijakan yang ditempuh akan senantiasa memperhatikan segala aspek yang terkait dengan lingkungan hidup.¹⁶

Kalahnya kepentingan lingkungan hidup dalam pertarungan yang tidak seimbang melawan kepentingan-kepentingan lain tersebut terjadi tidak

¹⁵ *Ibid*, hlm. 114

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, PT Rajagrafindo Persada, hlm. ix

hanya di forum-forum yang teknis eksekutif, tetapi juga di forum-forum politik, di lingkungan lembaga legislatif.¹⁷

Selain itu ditinjau dari upaya penegakan hukum lingkungan dalam kasus-kasus terbaru yang melibatkan korporasi menunjukkan lemahnya penegakan hukum lingkungan di ranah pengadilan. Upaya penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar banyak yang terbengkalai dan tidak serius yang menunjukkan lemahnya penegakan hukum lingkungan terkait masalah kehutanan.

Hal ini terkait dengan kebakaran hutan hebat yang terjadi di Riau pada Juli tahun lalu yang ditemukan adanya unsur kesengajaan yang akhirnya menyeret 15 perusahaan serta 25 orang ke meja hijau. Namun polisi menerbitkan SP3 pada Januari 2016 atau tiga bulan setelah penetapan tersangka. Ketua Forest Watch Indonesia (FWI), Togu Manurung menilai surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang diterbitkan polisi untuk 15 perusahaan yang sempat menjadi tersangka pembakaran hutan dan lahan harus dikaji ulang. Hal tersebut dinilai sebagai tindak pembiaran oleh aparat terhadap permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.¹⁸ Lebih lanjut, Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan indikasi areal kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 di Kalimantan dan Sumatera seluas 190.993 hektar. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang kemudian menimbulkan bencana kabut asap, bukan yang pertama kali. Dalam 20 tahun terakhir, bencana serupa hampir setiap tahun terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa sengketa lingkungan hidup yang berdampak pada generasi mendatang semakin lama semakin meningkat yang telah termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan melibatkan korporasi-korporasi besar, dimana pemerintah hanya berpihak pada kepentingan korporasi dan investasi. Kasus yang sampai

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 12

¹⁸ Kompas.com, 26 Agustus 2016, 14:47 “SP3 Kasus 15 Perusahaan Tersangka Pembakar Hutan Sinyal Negatif Penanganan Kebakaran Hutan,” diunduh Rabu 30 November 2017, pukul 09:00

ranah pengadilan tidak terselesaikan dengan baik dan menyisakan kerusakan lingkungan di berbagai daerah di Indonesia yang cukup parah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi penegakan hukum lingkungan yang memprihatinkan di Indonesia membutuhkan penanganan yang serius yakni salah satunya dengan adanya pengadilan khusus lingkungan hidup dimana hakim-hakim yang menangani kasus lingkungan merupakan hakim yang telah bersertifikasi lingkungan. Pada akhirnya, badan peradilan harus diperbaiki sebab menjadi tumpuan penyelesaian kasus sengketa lingkungan di ranah litigasi. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul, “URGENSI PENGADILAN KHUSUS DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat ditarik permasalahan untuk dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum lingkungan di Indonesia?
2. Bagaimana konsep Pengadilan Khusus Lingkungan Hidup di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat ditarik tujuan penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penegakan hukum lingkungan di Indonesia
2. Untuk mendeskripsikan konsep Pengadilan Khusus Lingkungan Hidup di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penulisan ini, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai kondisi penegakan hukum di Indonesia dan

sengketa mengenai lingkungan yang setiap tahun meningkat dan sudah termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam penerapannya dalam menyediakan solusi akibat penegakan hukum di bidang lingkungan hidup yang buruk di Indonesia dengan menciptakan sebuah model pengadilan khusus lingkungan hidup di Indonesia dalam menangani secara optimal permasalahan atau kasus-kasus lingkungan hidup di Indonesia

E. Kerangka Teoritik

Kerusakan dan pencemaran lingkungan, menurut J. Barros dan J.M. Johnston erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia, antara lain disebabkan, *pertama*, kegiatan-kegiatan industri, dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif dan lain-lain. *Kedua*, Kegiatan pertambangan, berupa terjadinya kerusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, pencemaran udara dan rusaknya lahan bekas pertambangan. *Ketiga*, kegiatan transportasi, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar, berupa minyak bumi dari kapal tanker. *Keempat*, kegiatan pertanian, terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia untuk memberantas serangga/tumbuhan pengganggu, seperti insektisida, pestisida, herbisida, fungisida dan juga pemakaian pupuk anorganik.¹⁹

Penegakan hukum lingkungan erat kaitannya dengan perilaku hakim dengan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman memasukkan unsur “kultur hukum” (“legal culture”) sebagai salah satu dari sistem hukum. Sebelumnya, pandangan kaum positivis-legalistik hanya menganggap hukum positiflah satu-satunya hukum dan satu-satunya unsur

¹⁹ Absori, “Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No.1, (Maret, 2006), hlm. 40

dari setiap sistem hukum²⁰. Dalam praktek peradilan saat ini, masih ada hakim yang berpandangan positivis-legalistik yang kurang memperhatikan lingkungan hidup. Pandangan hakim yang demikian tentu tidak dapat mewujudkan keadilan bagi lingkungan hidup²¹. Budaya hukum hakim yang positivis-legalistik bisa dilakukan perubahan ke arah budaya hukum hakim yang memperhatikan lingkungan hidup dengan adanya kebijakan hakim bersertifikasi lingkungan atau dengan dibentuknya pengadilan khusus lingkungan hidup secara khusus.

Dalam upaya menjelaskan penegakan hukum itu sendiri, dapat dimulai dari bangunan sistem hukum yang digambarkan oleh B. Arief Sidharta, yang lebih terfokus pada unsur substansi hukum yang bersumber pada cita hukum Pancasila sebagai dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar tata hukum nasional kita yang merupakan *rechtsidee* hukum.

Apa yang dijabarkan oleh B. Arief Sidharta, sesungguhnya dapat dilukis secara lebih detail dengan menambahkan unsur substansi, struktur, dan budaya hukum sebagaimana dalam konsep Friedman. *Pertama*, adalah struktur hukum yang dilambangkan dengan tiang-tiang pancang yang menopang tegaknya suatu sistem hukum. Badan-badan seperti DPR beserta Presiden dan birokrasi pemerintahan lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan, juga peradilan dan lembaga bantuan hukum, semuanya jika dilihat dari aspek kelembagaan adalah apa yang dimaksud dengan struktur hukum.

Kedua, adalah substansi hukum. Unsur ini dilambangkan dengan lapisan-lapisan yang secara hierarkis terdiri dari berbagai norma-norma hukum positif. Pada lapisan paling atas, terdapat suatu bintang pemandu yaitu cita hukum Pancasila. *Ketiga*, adalah budaya hukum. Unsur ini menyediakan lingkungan demi berfungsinya struktur dan substansi hukum

²⁰Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 225

²¹Rochmani, Safik Faozi, Adi Suliantoro, "Budaya Hukum Hakim dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup di Pengadilan", Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank Ke-2, 28 Juli 2016, Unisbank Semarang, hal. 3

tersebut. Tanpa lingkungan kehidupan yang bernama budaya hukum ini, struktur dan substansi hukum tidak akan mungkin bertahan. Lingkungan ini lebih kurang adalah perilaku dan praktik hukum.²²

Ketiga unsur tersebut dilihat dari konsep penstudi hukum saling terkait satu sama lain dalam bangunan sistem hukum di Indonesia, dimana penstudi hukum sendiri oleh Shidarta dibedakan menjadi partisipan (*medespeler*) dan pengamat (*toeschouwer*). Khusus untuk para partisipan dibedakan lagi antara mereka yang menjadi pengemban hukum teoritis dan pengemban hukum praktis. Pengemban hukum praktis inilah yang bersangkutan langsung dengan proses penegakan hukum di masyarakat yakni para fungsionaris hukum yang bekerja dengan sistem hukum positif di Indonesia. Memang benar, bahwa seorang pengemban hukum praktis khususnya hakim dimungkinkan membuat penemuan-penemuan hukum sekalipun demikian, penalaran harus dikembalikan ke dalam sistem hukum positif dalam menjamin agar putusan dapat dilaksanakan dalam perspektif sistem hukum di Indonesia.²³

Pada tataran normatif, secara konseptual, makna lingkungan hidup diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam buku ini selanjutnya disingkat UUPPLH pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Acuan normatif ini memberikan pemahaman dasar bahwa melestarikan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup harus memiliki beberapa sarana utama sebagai syaratnya. Yaitu, adanya sarana institusi, dana dan sarana hukum. Hukum mempunyai kedudukan dan arti penting dalam menghadapi dan memecahkan berbagai masalah dalam lingkungan hidup dan merupakan dasar yuridis bagi pelaksanaan kebijaksanaan negara yang harus

²² *Ibid.*, hlm. 308

²³ *Ibid.*, hlm. 318

dilaksanakan oleh pemerintah.²⁴ Dalam teori Friedman, penegakan hukum lingkungan erat kaitannya budaya hukum, struktur hukum, maupun substansi hukum.

Dalam halnya dengan penegakan hukum lingkungan dengan perspektif hukum progresif, hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan hukum progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami di Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut²⁵.

Pendekatan progresif menurut Satjipto Rahardjo, menempatkan paradigma manusia mempedulikan faktor perilaku (*behaviour, experience*). Pendekatan hukum progresif adalah hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum²⁶. Berkaitan dengan konsepsi keadilan, maka pemikiran progresif yang dicitakan termuat dalam UU No. 32 tahun 2009 lebih merupakan implementasi dari keadilan *legalis*, yakni keadilan yang ingin diciptakan oleh UU²⁷.

Lebih lanjut mengenai hukum progresif, hukum progresif lebih memilih konsep perubahan dan pengubah Karl Renner yang mengikuti modus” gradually working out dari pada changing tge role”. Progresifisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Progresifisme tidak ingin menjadi hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan.

²⁴ H. Joni, 2016, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 1-2

²⁵ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan, Dalam “ *Jurnal Hukum Progresif*”, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Vol 1/ No.1/April 2005, hal. 3-5

²⁶ Absori, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Edisi Revisi Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014, hal. 173

²⁷ Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Bandung, Armico, 1987, hal 10

Berhubungan dengan penegakan hukum di bidang lingkungan yang begitu lemah dalam ranah litigasi yang seharusnya penyelesaian setiap sengketa membutuhkan peran hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lain yang memiliki persepsi sama dalam menegakan peraturan perundang-undangan lingkungan, dan juga banyaknya kasus-kasus lingkungan hidup yang tidak terselesaikan dengan baik, maka pembentukan pengadilan khusus yang mengadili lingkungan hidup merupakan langkah progresif dalam menyelesaikan sengketa lingkungan yang banyak melibatkan berbagai kepentingan, termasuk kepentingan korporasi dan pemerintah.

Berhubungan dengan hal di atas, Komisi IV DPR yang membidangi persoalan lingkungan mengusulkan dibentuknya pengadilan khusus yang menangani kasus lingkungan. Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi, Muhnur Satyahaprabu mengatakan bahwa tren kasus lingkungan akan terus meningkat tahun depan sehingga diperlukan penegak hukum yang berintegritas dan diperlukan penanganan khusus melalui pengadilan khusus. Selain itu pengadilan khusus yang menangani persoalan lingkungan ini dapat mempercepat waktu proses penyelesaian kasus lingkungan yang selama ini diselesaikan dalam waktu sangat lama. Contoh dalam kasus yang menyangkut PT Bumi Mekar Hijau, dimana pemerintah tidak serius dalam mengajukan gugatan dan hanya menuntut perusahaan tersebut membayar Rp 7,9 triliun. Indikasi ketidakseriusan pemerintah lainnya adalah sikap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan yang terkesan menutupi gugatan terhadap PT Bumi Mekar. Selain itu hakim yang menangani kasus ini tidak memiliki sertifikasi lingkungan padahal berdasarkan surat keputusan MA hakim yang menangani masalah lingkungan harus memiliki sertifikasi lingkungan.²⁸

Wahana lingkungan hidup (Walhi) Indonesia menyatakan pembentukan pengadilan khusus lingkungan hidup diyakini akan bermanfaat mewujudkan keadilan ekologis di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati dalam siaran pers memperingati

²⁸ Fathiyah Wardah, 21 September 2015, dalam voaindonesia.com, “DPR, Walhi Desak Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan, diunduh Rabu 30 November 2017, pukul 09:00

Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2017 di Jakarta, menyatakan tantangan penegakan hukum lingkungan semakin berat di tengah dominasi kekuasaan ekonomi dan politik. Nur Hidayati menjelaskan bahwa peringatan hari lingkungan hidup yang diselenggarakan pada tahun 2017 ini hendaknya menjadi momentum serius dalam merumuskan pengadilan lingkungan hidup. Pengadilan lingkungan hidup diharapkan mampu memutus rantai impunitas kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi yang sudah masuk kategori *extraordinary crime*. Nur Hidayati mengemukakan bahwa kejahatan lingkungan hidup sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Sebab, kejahatan ini mengancam hidup dan kehidupan manusia baik pada generasi sekarang maupun akan datang.

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut, maka perlunya dikaji sebuah terobosan baru yang bersifat progresif yakni dengan mengkaji konsep pengadilan khusus lingkungan hidup yang dapat dibentuk di Indonesia sebagai fungsi utama dalam memaksimalkan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

F. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian akan disusun dalam format lima bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, roadmap penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II berisi tentang kajian teori, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan, kajian teori tentang penegakan hukum dan penegakan hukum lingkungan dan tinjauan pustaka tentang pengadilan khusus di Indonesia.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang berisi uraian singkat mengenai jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai gambaran penegakan hukum lingkungan di Indonesia, konsep Pengadilan Khusus Lingkungan Hidup di Indonesia.

BAB V berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan, saran, implikasi, dan juga rekomendasi terhadap permasalahan terkait.

DAFTAR PUSTAKA